

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemilihan presiden di Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat. Untuk menang, pasangan calon harus mendapat lebih dari 50% suara secara nasional dan minimal 20% suara di lebih dari separuh provinsi. Jika tidak ada yang memenuhi syarat, maka diadakan putaran kedua. Sistem ini membuat rakyat merasa terlibat langsung dan partisipasi pemilih cukup tinggi. Namun, karena ada syarat ambang batas pencalonan (*presidential threshold*), jumlah calon yang bisa dipilih jadi terbatas. Kampanye pun lebih fokus ke wilayah padat penduduk, meskipun aturan 20% suara di banyak provinsi berusaha mendorong pemerataan kampanye.
2. Pemilihan presiden di AS menggunakan sistem tidak langsung. Rakyat memilih "*electors*" yang kemudian menentukan siapa presiden. Setiap negara bagian punya jumlah suara berdasarkan jumlah wakilnya di Kongres. Calon harus menang minimal 270 dari 538 suara elektoral. Sebagian besar negara bagian menerapkan sistem pemenang mengambil semua suara. Akibatnya, ada kasus calon menang meskipun kalah suara rakyat. Kampanye lebih fokus di negara bagian yang hasilnya sulit ditebak (*swing states*), bukan di semua wilayah secara merata.
3. Sistem Indonesia dianggap lebih mewakili suara rakyat karena pemilih memilih langsung dan hasilnya menentukan secara langsung. Namun,

tantangannya adalah politik uang yang bisa merusak kualitas demokrasi. Di sisi lain, sistem AS lebih melindungi negara bagian kecil agar tetap punya pengaruh, meskipun suara rakyat bisa tidak sejalan dengan hasil akhir pemilu. Sistem AS menjaga keseimbangan antarwilayah, tapi bisa mengabaikan suara mayoritas nasional.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar pengawasan terhadap politik uang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia diperkuat. Bawaslu harus bekerja secara profesional dan jujur agar pemilu berjalan sesuai aturan. Masyarakat juga perlu ikut aktif mengawasi jalannya pemilu, tidak hanya mengandalkan lembaga resmi. Sanksi terhadap pelaku politik uang harus ditegakkan secara tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera. Selain itu, penting untuk meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat agar pemilih bisa menentukan pilihan berdasarkan visi dan program kerja calon, bukan karena uang atau emosi sesaat. Penulis juga menyarankan agar proses penghitungan suara lebih transparan dan akurat. Teknologi informasi sebaiknya dimanfaatkan, tetapi tetap harus diawasi dengan ketat. Penggunaan rekapitulasi elektronik yang diawasi lembaga independen dapat mempercepat dan meningkatkan keakuratan hasil pemilu.

Untuk sistem *electoral college* di Amerika Serikat, penulis menyarankan agar dilakukan reformasi agar lebih adil dan mewakili suara rakyat. Salah satu cara adalah dengan mengganti sistem *winner-take-all* menjadi sistem proporsional, di mana suara elektoral dibagi sesuai perolehan suara kandidat. Perlu juga dibuat aturan nasional yang mewajibkan para *electors* memberikan suara sesuai hasil pemilu di negara bagian mereka. Selain itu, kampanye

sebaiknya tidak hanya fokus di negara bagian yang disebut *swing states*, tetapi merata ke semua wilayah agar partisipasi pemilih meningkat. Meskipun *electoral college* bertujuan melindungi negara bagian kecil, sistem ini tetap perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan prinsip demokrasi yang adil dan mewakili semua suara rakyat.

